

Implementasi Sila Keempat Pancasila Sebagai Etika Partisipasi Politik Di Era Digital

Radhya Putri Salwa Alifah¹, Dona Purnama^{b,2}

^{a,b}Program Studi Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang Jl. Raya Puspatek, Buaran, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten Kode Pos 15310

¹radhyaptrr@gmail.com; ²purnamaana1474@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 27 September 2025

Direvisi: 25 Oktober 2025

Disetujui: 20 November 2025

Tersedia Daring: 1 Desember 2025

Kata Kunci:

Media Sosial

Gen-z

Hak

Kewajiban

Warga negara

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam pola pikir dan perilaku generasi muda, terutama generasi Z. Media sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka memainkan peran penting dalam membentuk persepsi terhadap berbagai isu sosial dan kewarganegaraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana media sosial mempengaruhi pemahaman generasi Z mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang mengkaji berbagai jurnal, artikel ilmiah, dan sumber relevan lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa media sosial memiliki dua sisi pengaruh: di satu sisi, ia mampu meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi sosial; di sisi lain, media sosial juga dapat memunculkan misinformasi yang mengaburkan pemahaman tentang tanggung jawab kewarganegaraan. Oleh karena itu, diperlukan literasi digital dan pendidikan kewarganegaraan yang adaptif guna membekali generasi Z dengan pemahaman yang kritis dan bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara di era digital.

ABSTRACT

Keywords:

Social Media

Gen-Z

Rights

Obligations

Citizens

The development of information and communication technology has brought about major changes in the mindset and behavior of the younger generation, especially Generation Z. Social media, as an integral part of their lives, plays an important role in shaping their perceptions of various social and citizenship issues. This study aims to examine how social media influences Generation Z's understanding of their rights and obligations as citizens. The method used in this study is a literature study with a descriptive qualitative approach, which examines various journals, scientific articles, and other relevant sources. The results of the study show that social media has two sides to its influence: on the one hand, it can increase political awareness and social participation; on the other hand, social media can also give rise to misinformation that obscures understanding of civic responsibility. Therefore, adaptive digital literacy and civic education are needed to equip Generation Z with a critical and responsible understanding of their rights and obligations as citizens in the digital era.

© 2025, Radhya Putri Salwa Alifah, Dona Purnama
This is an open access article under CC BY-SA license



How to Cite: Alifah, R. P. S., & Purnama, D. (2025). Implementasi Sila Keempat Pancasila Sebagai Etika Partisipasi Politik Di Era Digital. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 5(2), 109-115. <https://doi.org/10.47200/aossagcj.v5i2.3318>

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap kehidupan politik Indonesia secara fundamental. Media sosial, ruang diskusi digital, serta platform interaksi virtual menjadi arena baru bagi masyarakat dalam mengekspresikan pendapat, membentuk opini publik, hingga berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Transformasi digital ini membuka kesempatan bagi demokratisasi yang lebih inklusif, terutama karena akses informasi kini semakin mudah dan cepat. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan baru seperti maraknya hoaks, polarisasi, disinformasi, ujaran kebencian, hingga menurunnya kualitas deliberasi publik. Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila terutama sila keempat tentang *“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”* menjadi rujukan normatif yang semakin relevan. Sila keempat menekankan pentingnya musyawarah, kebijaksanaan kolektif, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, serta orientasi terhadap kepentingan bersama dalam setiap proses pengambilan keputusan politik. Nilai-nilai ini sangat krusial untuk menjadi etika dasar dalam partisipasi politik digital, mengingat ruang digital sarat dengan bias algoritma, echo chamber, dan perilaku impulsif yang sering mendorong masyarakat mengambil posisi ekstrem (Victorio et al., 2025). Dari sisi akademik, penelitian terkini menegaskan kembali urgensi revitalisasi nilai Pancasila dalam kehidupan digital. Artikel Sikana et al. (2025) menunjukkan bahwa globalisasi telah memudahkan identitas nasional dan melemahkan moral generasi muda, sehingga Pancasila perlu dihadirkan sebagai fondasi identitas dan etika publik. Temuan serupa dijelaskan oleh Nisaa et al. (2025) bahwa Pancasila tetap sangat relevan sebagai pedoman menghadapi disrupsi digital, terutama dalam memerangi hoaks, polarisasi, dan degradasi etika digital. Kedua penelitian tersebut menegaskan bahwa revitalisasi nilai Pancasila di ruang digital bukan hanya penting, tetapi mendesak.

Di sisi lain, ruang digital memberi peluang besar bagi generasi muda, terutama Generasi Z, untuk berpartisipasi dalam isu politik melalui diskusi daring, petisi online, kampanye isu, hingga gerakan sosial berbasis media sosial. Namun, penelitian Permata Sari et al. (2025) menunjukkan bahwa lemahnya literasi digital menyebabkan banyak partisipasi berlangsung tanpa filter etika, sehingga memperburuk polarisasi dan miskonsepsi. Karena itu, diperlukan internalisasi nilai musyawarah dan kebijaksanaan agar partisipasi politik digital tetap berkualitas. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memegang peranan strategis dalam konteks ini. Rahayu et al. (2025) menegaskan bahwa PKn berfungsi membentuk etika digital peserta didik, mengajarkan nilai Pancasila, kesadaran hukum, serta kemampuan memilah informasi. Supandri et al. (2025) menambahkan bahwa PKn dapat memperkuat kesadaran sosial dan literasi digital mahasiswa agar mampu berperilaku etis di ruang digital. Temuan ini menunjukkan bahwa revitalisasi sila keempat tidak hanya bersifat moral, tetapi juga instruksional dalam dunia pendidikan. Namun, tantangan semakin besar ketika ruang digital dijadikan arena untuk memobilisasi opini publik secara masif. Praktik manipulasi informasi, penggunaan bot politik, hingga penyebaran disinformasi dapat merusak kualitas deliberasi politik (Hasan et al., 2025). Tanpa etika Pancasila, terutama prinsip kebijaksanaan dan musyawarah, ruang digital berpotensi menjadi katalis konflik sosial.

Karena itu, implementasi sila keempat sebagai etika partisipasi politik digital perlu dilakukan secara sistematis. Pemerintah harus memperkuat regulasi informasi dan penanganan hoaks; institusi pendidikan perlu memperkuat literasi digital berbasis Pancasila; sedangkan masyarakat perlu membangun budaya dialog yang menghargai perbedaan dan mengedepankan kepentingan publik.

Sebagaimana ditunjukkan Syahputra et al. (2023), literasi digital berbasis Pancasila memperkuat ketahanan masyarakat terhadap manipulasi politik dan meningkatkan kualitas partisipasi. Dengan demikian, kajian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana nilai musyawarah, kebijaksanaan, dan perwakilan dapat diterapkan secara efektif dalam ruang digital. Selain itu, bagaimana etika Pancasila dapat digunakan sebagai pedoman untuk membangun demokrasi digital yang sehat, inklusif, dan berkeadaban di tengah derasnya arus informasi. Upaya ini diperlukan agar digitalisasi politik tidak menggerus fondasi identitas dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia.

2. Metode

Penelitian Penelitian ini menggunakan teknik studi literatur sebagai metode utama. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan topik implementasi sila keempat Pancasila dalam etika partisipasi politik di era digital. Sumber yang dianalisis meliputi jurnal ilmiah, artikel penelitian, prosiding, dan dokumen akademik yang diterbitkan dalam rentang waktu 2021–2025. Proses pengumpulan literatur dilakukan melalui penelusuran publikasi ilmiah menggunakan kata kunci seperti *Pancasila*, *sila keempat*, *demokrasi digital*, *etika digital*, dan *partisipasi politik online*. Setelah literatur terkumpul, peneliti melakukan seleksi untuk memastikan bahwa sumber yang digunakan benar-benar relevan, berasal dari publikasi ilmiah yang kredibel, dan memuat pembahasan yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila serta dinamika ruang digital. Literatur yang telah terseleksi kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi pola, tema, dan gagasan utama yang muncul dalam berbagai penelitian. Analisis ini mencakup tema mengenai nilai musyawarah dalam ruang digital, perilaku politik masyarakat di media sosial, literasi digital berbasis Pancasila, serta tantangan etika yang muncul dalam interaksi digital. Teknik studi literatur ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman komprehensif mengenai bagaimana sila keempat dapat diterjemahkan sebagai pedoman etika partisipasi politik di era digital, serta bagaimana dinamika media sosial mempengaruhi praktik politik masyarakat.

3. Hasil dan Pembahasan

Perbedaan Persepsi Tentang Hak Dan Kewajiban Warga Negara Antara Generasi Z Yang Aktif Dan Tidak Aktif Di Media Sosial

Generasi Z merupakan kelompok yang tumbuh berdampingan dengan perkembangan teknologi digital, sehingga penggunaan media sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan mereka. Dalam penggunaan tersebut, terdapat dua kategori pengguna, yaitu pengguna aktif dan pengguna tidak aktif. Generasi Z yang aktif berinteraksi di media sosial cenderung mengikuti akun-akun edukatif, kanal pemerintah, maupun organisasi kepemudaan, sehingga lebih responsif terhadap isu-isu kewarganegaraan (Agustina, 2023). Mereka lebih sering terpapar berbagai sudut pandang, diskusi, dan opini publik yang muncul secara dinamis di platform digital. Dalam konteks sila keempat Pancasila, pengalaman digital generasi ini memperkuat kemampuan untuk menerima perbedaan pendapat, melihat isu dari berbagai perspektif, dan membiasakan diri berdialog dalam ruang publik virtual. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara partisipasi digital dan nilai musyawarah dalam kehidupan bernegara. Sebaliknya, Generasi Z yang tidak aktif di media sosial memiliki ruang belajar kewarganegaraan yang lebih terbatas. Pengetahuan mereka cenderung bersumber dari pendidikan formal yang bersifat lebih kaku dan tekstual. Minimnya paparan terhadap diskusi aktual membuat pemahaman mereka menjadi kurang berkembang, terutama dalam memahami isu kontemporer yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Kondisi ini menyebabkan mereka kurang terlatih dalam menerima keberagaman pandangan, yang merupakan inti dari sila keempat.

Dampak Media Sosial Terhadap Pandangan Generasi Z mengenai Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara

Media sosial menjadi ruang yang memungkinkan Generasi Z untuk berkomunikasi, mencari informasi, dan mengekspresikan diri. Platform ini menyediakan arus informasi yang sangat cepat dan luas sehingga mempermudah mereka mengikuti perkembangan isu nasional (Effendi & Dewi, 2021).

Diskusi-diskusi yang muncul di media sosial turut memengaruhi cara mereka memahami hak dan kewajiban warga negara. Dalam perspektif sila keempat, media sosial berperan sebagai ruang musyawarah modern, tempat masyarakat dapat saling menyampaikan pendapat, memberikan masukan, dan menilai berbagai isu publik. Namun, sifat terbuka media sosial juga membuatnya menjadi ruang yang mudah dimasuki informasi yang tidak valid. Diskusi yang tidak sehat atau dipenuhi kebencian dapat membuat pemahaman tentang kewarganegaraan menjadi kabur. Generasi Z yang sangat bergantung pada teknologi terkadang menghadapi tantangan seperti menurunnya komunikasi langsung, kecemasan digital, dan ketidakmampuan menyaring informasi secara kritis (Christiani & Ikasari, 2020). Tantangan ini dapat memengaruhi cara mereka mengambil keputusan dan menilai informasi, yang merupakan bagian penting dari nilai “hikmat kebijaksanaan” dalam sila keempat Pancasila.

Dampak Positif dan Negatif Media Sosial bagi Generasi Z Terkait Hak dan Kewajiban

Media sosial memberikan beberapa dampak positif bagi Generasi Z, antara lain kemudahan akses informasi, perluasan jaringan pertemanan, komunikasi jarak jauh, dan ruang ekspresi diri. Dampak positif ini mendukung pembentukan partisipasi warga negara yang lebih aktif dan dapat memperkuat pemahaman terhadap hak-hak dasar. Akses terhadap berbagai informasi memungkinkan mereka melihat isu kewarganegaraan dari berbagai sudut pandang, yang selaras dengan nilai musyawarah dalam sila keempat. Namun, dampak negatif juga muncul, misalnya kesulitan membedakan antara informasi valid dan hoaks, menurunnya kemampuan berinteraksi langsung, ketergantungan pada jaringan internet, dan risiko penipuan digital (Putri et al., 2024). Hoaks khususnya berpotensi menggiring opini dan melemahkan proses pengambilan keputusan yang bijaksana. Dalam konteks sila keempat, hoaks dapat menghambat proses musyawarah karena mengaburkan fakta dan melemahkan kemampuan masyarakat untuk mencapai kesepakatan berdasarkan informasi yang tepat.

Tantangan dan Peluang Media Sosial sebagai Sarana Edukasi Hak dan Kewajiban Warga Negara

Media sosial memiliki peluang besar sebagai sarana edukasi kewarganegaraan. Konten edukatif dalam bentuk video pendek, infografis, atau postingan ringkas di platform seperti TikTok, Instagram, atau X dapat menyampaikan materi kewarganegaraan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami (Gozal et al., 2024). Fitur seperti komentar, polling, dan siaran langsung juga membuka ruang diskusi yang dapat mendukung praktik musyawarah secara virtual. Namun, tantangan muncul ketika informasi yang beredar tidak valid dan memicu disinformasi. Hoaks merupakan hambatan utama yang dapat memengaruhi pemahaman generasi muda terhadap isu kewarganegaraan (Meel & Vishwakarma, 2020). Selain itu, algoritma media sosial yang sering menampilkan konten sejenis membuat pengguna hanya melihat satu sudut pandang, yang dapat menghambat pemahaman terhadap keberagaman opini. Dalam perspektif sila keempat, informasi yang bias dan polarisatif mengganggu proses musyawarah dan pengambilan keputusan. Literasi digital yang rendah juga menjadi tantangan lain, karena banyak pengguna hanya membaca informasi secara sekilas tanpa melakukan verifikasi (Nabila & Mulyani, 2023). Konten edukatif sering kali kalah bersaing dengan konten hiburan sehingga perlu disesuaikan dengan tren agar lebih mudah diterima oleh generasi muda (Hasanah et al., 2024). Dengan demikian, pemanfaatan media sosial untuk edukasi hak dan kewajiban warga negara perlu dilakukan secara kreatif, relevan, dan tetap mengacu pada nilai-nilai Pancasila agar dapat memperkuat kesadaran akan pentingnya musyawarah, kebijaksanaan, dan partisipasi yang sehat dalam ruang digital.

Discussion

Dampak Positif Negatif Media Sosial Bagi Generasi Z Terhadap Hak Dan Kewajiban Warga Negara

Saat ini, media sosial yang banyak digunakan dapat memberikan dampak positif dan negatifnya untuk generasi z dan bukan hanya untuk generasi z saja, tapi dampaknya bisa juga untuk generasi sebelumnya dan sesudahnya. Berikut dampak positif dan negatifnya:

1. Dampak Positif

- a. Mudah mengakses informasi
- b. Mendapatkan banyak teman yang jauh dari luar negeri ataupun dalam negeri
- c. Mempermudah dalam berkomunikasi jarak jauh
- d. Dapat mengekspresikan diri

2. Dampak Negatif

- a. Tidak dapat membedakan antara hoax dan bukan
- b. Sulit bergaul dengan orang sekitar

- c. Jaringan yang tidak selalu stabil atau pun ada di setiap daerah
- d. Mudah untuk tertipu.

Tantangan Dan Peluang Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Edukasi Hak Dan Kewajiban Warga Negara Bagi Generasi.

Adanya media sosial memberikan banyak peluang untuk menyebarkan dan menanamkan pemahaman tentang hak-hak dan kewajiban warga negara, banyak peluang yang ditawarkan untuk memberikan pemahaman mendalam terutama untuk generasi z yang memiliki tantangan yang lebih di era digital ini. Peluang strategis dimulai dari akses yang cepat dan penyebaran informasi yang luas. Informasi dan konten mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara dapat dibuat dalam bentuk video pendek, infografis yang dapat diunggah di media sosial seperti tik-tok, instagram dan twitter ketiga media sosial tersebut bisa dengan mudah diakses seluruh indonesia bahkan dunia pun dapat melihatnya, pembuatan konten dan informasi yang cepat dalam pengunggahan dan penyebaran yang luas memberikan peluang generasi z untuk lebih memahami secara mendalam mengenai hak dan kewajiban warga negara.

Media sosial memiliki format yang menarik berupa video singkat dan meme yang membuat konten dan informasi dapat dibuat semenarik mungkin untuk menarik perhatian pengguna, di tengah kelucuan meme dan singkatnya video tetapi di dalamnya mengandung informasi dan konten yang bermanfaat dan berguna bagi generasi z terutama. Karakter yang viralitas atau trending membuka peluang konten dan informasi mengenai hak dan kewajiban menyebar dan dapat diakses oleh seluruh pengguna media sosial, nilai-nilai mengenai demokrasi, toleransi dan keterlibatan warga dapat tersebar dengan cepat dan luas namun berkualitas. Fitur-fitur yang disediakan seperti polling, komentar, live streaming mendorong terbukanya diskusi publik mengenai hak dan kewajiban warga negara yang tidak dipahami.

Di tengah besarnya peluang yang ditawarkan untuk menanamkan pemahaman tentang hak dan kewajiban melalui media sosial tak luput dari tantangan yang sering dan akan dihadapi ketika menggunakan media sosial dalam menanamkan pemahaman terkait hak dan kewajiban warga negara yaitu tingginya disinformasi dan hoaks, adanya oknum yang tidak bertanggung jawab dalam penyebaran berita dan informasi hoaks dapat memelintir pemahaman generasi z terhadap isu-isu kebangsaan terutama dalam hak dan kewajiban. Jika generasi z yang dalam pemahaman atau gampang, menerima informasi tanpa melihat dan menganalisis terlebih dahulu akan terjadi disinformasi dan memungulkan terjadinya penyalahgunaan hak dan pelanggaran kewajiban warga negara. Polarisasi opini juga menjadi tantangan yang mana generasi z hanya terpapar atau menerima informasi dari satu sudut pandang tertentu tanpa mencari sumber yang lain, generasi z hanya menerima dan memahami sedikit pengetahuan dari banyaknya informasi mengenai isu kewarganegaraan. Literasi yang rendah dalam mengolah dan menganalisis informasi, informasi yang disampaikan secara tekstual membuat generasi z malas membaca dan hanya membaca sampulnya saja membuat kurang lengkapnya informasi yang diterima membuat pemahaman mengenai hak dan kewajiban hanya sekedar sampul saja tidak secara mendalam. Sifat atau karakteristik yang viralitas dan trending membuat informasi edukatif sering terkalahkan dengan tren-tren konten hiburan yang diadopsi dari luar, generasi z lebih tertarik terhadap konten yang viral dan trending, sehingga konten dan informasi edukatif seperti konten dan informasi mengenai isu kebangsaan, isu kewarganegaraan redup terkalahkan. Tantangan ini dapat diatasi dengan mengimbangi trend-trend yang sedang viral, informasi dan konten dapat digabungkan dengan trend yang sedang banyak diikuti atau diminati oleh generasi Z, memudahkan pemahaman dan pembacaan, hasil dan pembahasan tidak dipisah dalam penulisannya.

4. Kesimpulan

Media sosial memiliki kontribusi penting dalam mempengaruhi cara berpikir Generasi Z tentang hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dengan tingkat penggunaan media sosial di Indonesia mencapai 73,7% dari seluruh populasi. Ada perbedaan pandangan yang jelas antara generasi z yang aktif di media sosial dan yang tidak, di mana mereka yang aktif lebih peka terhadap isu kewarganegaraan, lebih kritis dalam menghadapi berbagai permasalahan, dan memiliki wawasan yang lebih luas karena terpapar berbagai sudut pandang. Di sisi lain, pengguna yang tidak aktif cenderung memiliki pemahaman yang lebih terbatas dan kurang responsif terhadap isu-isu terkini. Media sosial menyediakan berbagai

kesempatan untuk pendidikan kewarganegaraan seperti akses informasi yang cepat, penyebaran informasi yang luas, format konten yang menarik, dan fitur interaktif, namun juga membawa tantangan berupa berita palsu, polarisasi pandangan, rendahnya kemampuan literasi digital, dan persaingan dengan konten hiburan yang viral. Pemahaman dan penanaman nilai-nilai Pancasila oleh generasi Z juga dipengaruhi oleh berbagai jenis konten dan interaksi sosial di platform digital, di mana interaksi yang positif dapat memperluas pemahaman mereka, sementara interaksi yang negatif dapat mengganggu pengertian mereka. Secara keseluruhan, media sosial memberikan manfaat positif seperti kemudahan dalam mengakses informasi, memperluas jaringan, komunikasi yang mudah, serta sebagai saluran untuk mengekspresikan diri, namun juga menghadirkan masalah seperti sulitnya membedakan informasi yang benar dan salah, berkurangnya interaksi tatap muka, ketergantungan pada internet, dan potensi penipuan.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pamulang, khususnya Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), atas dukungan dan fasilitas yang diberikan selama proses penyusunan tugas ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah Pengamalan Nilai-nilai Pancasila, Bapak Heri Kurnia, S.Pd., M.Pd., atas bimbingan dan arahan yang sangat membantu dalam penyelesaian tugas ini.

6. Daftar Pustaka

- Agustina, A. (2023). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam media sosial pada Generasi Z. *JAGADDHITA: Jurnal Kebhinekaan dan Wawasan Kebangsaan*, 3(1), 1–10.
- Christiani, L., & Ikasari, R. (2020). Generasi Z dan pemeliharaan relasi antar generasi dalam perspektif budaya Jawa. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, 4(2), 84–105.
- Damayanti, A. D. (2024). *Pemanfaatan media sosial sebagai media informasi dan publikasi (Studi deskriptif kualitatif pada akun Instagram @rumahkimkotatangerang)* Universitas Islam Syekh Yusuf.
- Effendi, F. (2021). Generasi milenial ber-Pancasila di media sosial. *Journal Civics & Social Studies*, 5(1), 116–124.
- Florenyca, T. N. (2024). Peran media sosial dalam penyebaran dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila serta Pendidikan Kewarganegaraan di kalangan Generasi Z. *JKEPMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 90–91.
- Gozal, A. V., Byanca, Z. A., Beatitudo, E. S., Surjo, F. R., Kasdim, R., & Tumanggor, R. O. (2024). Studi literatur tentang peran media sosial dalam meningkatkan kesadaran bela negara di kalangan Generasi Z. *TSAQOFAH*, 5(1), 14–22.
- Hasanah, U., Ependi, R., Hadi, Y., Kamula, W. N., Fadhila, Z., Anugerah, S. S., & Zubair, M. (2024). Dampak media sosial terhadap pemahaman nilai Pancasila Generasi Z di SMPN 9 Mataram. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 7(12), 1–10.
- Meel, P., & Vishwakarma, D. K. (2020). Fake news, rumor, information pollution in social media and web: A contemporary survey of state-of-the-arts, challenges and opportunities. *Expert Systems with Applications*, 153, 112986. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2019.112986>
- Melsya, D. P., & Syarbaini, E. (2024). Analisis dampak perilaku online Gen Z terhadap identitas kewarganegaraan dalam era digital. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 4(1), 211–223.
- Nabila, D. P., & Mulyani, J. (2023). Dampak penggunaan media sosial terhadap interaksi sosial masyarakat: Studi literatur. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 810–815.

- Nisaa, N. H., Kusumawati, I., & Purnama, K. G. (2025). Refleksi kritis terhadap relevansi Pancasila di era disrupsi digital. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 5(1), 35–42. <https://doi.org/10.47200/aossagcj.v5i1.3064>
- Pradanaa, M. Y. A., Yusfiarto, R., Sofiana, R., Berakon, I., & Fadillah, M. F. (2022). Central governance policy and local governance participation: Risk mitigation of Indonesia SMEs COVID-19 affected. *EDUEKSOS: Jurnal Pendidikan Sosial dan Ekonomi*, 11(2), 1–12.
- Putri, F. T., Nainggolan, E. O., Syahrin, F. C. A., Ramadhani, N. A., Darmayanti, N. E., & Ghozali, I. (2024). Peran media sosial dalam penyebaran dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila serta Pendidikan Kewarganegaraan di kalangan Generasi Z. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 50–60.
- Rahayu, Y. M., Rahman, A., Nurjanah, E., Ningsih, I. F., & Mardiana. (2025). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk etika digital peserta didik di era globalisasi teknologi dan media sosial. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 5(2), 64–71. <https://doi.org/10.47200/aossagcj.v5i2.3233>
- Ruhyanti, N., Alparea, N., Fakhira, Z. N., Abdulah, D. F., & Hibatullah, R. A. (2023). Hak dan kewajiban warga negara berdasarkan hukum yang ada di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 226–230.
- Setiawati, S., Devi, L. S., & Jayadi, H. (2024). Generasi Z tangguh: Memahami hak dan kewajiban dalam berinternet melalui edukasi UU ITE. *MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary*, 3(1), 1–12.
- Sikana, A. M., Dzulqarnain, A. A., Syafitri, F. R., & Faizin, M. (2025). Peran Pancasila sebagai fondasi identitas nasional Indonesia dalam menjawab tantangan globalisasi. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 5(2), 78–84. <https://doi.org/10.47200/aossagcj.v5i2.3248>
- Supandri, S., Ulfah, A., Firmansyah, I., Nuraeni, S., & Kius, F. S. (2025). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam menguatkan etika digital dan kesadaran sosial mahasiswa di era media sosial. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 5(2), 50–56. <https://doi.org/10.47200/aossagcj.v5i2.3228>
- Tinambunan, C. P., Syailendra, S., & Pratiwi, F. S. (2024). *Analisis perilaku Generasi Z dalam menentukan pilihan politik*. Universitas Sriwijaya & Universitas Kader Bangsa.
- Wahyuni, A. S. (2022). Literature review: Pendekatan berdiferensiasi dalam pembelajaran IPA. *Jurnal Pendidikan MIPA*, 12(2), 118–125.
- Yulianti, K., & Utomo, T. (2022). Perbandingan implementasi pembelajaran daring dan luring di sekolah dasar. *JURNAL BASICEDU: Research & Learning in Elementary Education*, 6(2), 2410–2418.